

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH
(SIMDA) BARANG MILIK DAERAH (BMD) DALAM PENGELOLAAN BMD
DI PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK**

SAA'DILLAH

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai proses penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD) dalam pengelolaan BMD; apakah SIMDA BMD efektif dan faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitasnya, dengan objek penelitian pada Pemerintah Kabupaten Landak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, observasi dan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerapan diawali dengan menetapkan beberapa regulasi terkait pengelolaan BMD yang selanjutnya dilakukan sosialisasi dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai; pengelolaan BMD dengan aplikasi SIMDA BMD sangat efektif dan faktor yang mempengaruhinya efektivitasnya adalah dikarenakan *output* yang dihasilkan oleh aplikasi SIMDA BMD dapat memenuhi kebutuhan pengguna.

Kata kunci : *Analisis, Penerapan, SIMDA, Pengelolaan BMD dan aset tetap*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, kewenangan pemerintah daerah semakin besar dalam mengatur pemerintahannya sendiri, yang mengacu pada prinsip *good governance* bahwa pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Tujuannya agar semua yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, termasuk aset tetap berupa Barang Milik Daerah (BMD). Informasi BMD memberikan sumbangan yang signifikan di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) khususnya laporan neraca yaitu berkaitan dengan aset tetap. Hal ini menjadikan pertanggungjawaban atas BMD menjadi sangat penting.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas LKPD Kabupaten Landak Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Landak memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut juga, diinformasikan bahwa ada beberapa catatan yang masih memerlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan yaitu pengelolaan aset tetap. Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Kabupaten Landak terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan maupun BMD, salah satu langkah yang ditempuh untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban.

Dalam rangka untuk mewujudkan hal tersebut diatas pemerintah Kabupaten Landak bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam pengelolaan BMD di Pemerintah Kabupaten Landak yaitu Aplikasi SIMDA BMD yang dibangun dan dikembangkan oleh BPKP.

[JAAKFE, Desember 2016]

Sesuai dengan visi BPKP sebagai Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 192 tentang BPKP. BPKP dalam hal ini Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas LKPD menuju terwujudnya *good governance*.

Berdasarkan gambaran pada latar belakang ini, penulis tertarik untuk memperoleh gambaran lebih jauh tentang proses penerapan Aplikasi SIMDA BMD, efektifitas penggunaan aplikasi SIMDA BMD serta faktor – faktor yang mempengaruhinya, maka peneliti mengambil judul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD) dalam Pengelolaan BMD di Pemerintah Kabupaten Landak.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada beberapa hal yang dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penerapan aplikasi SIMDA BMD dalam pengelolaan BMD di Pemerintah Kabupaten Landak?
2. Apakah pengelolaan BMD dengan aplikasi SIMDA BMD efektif?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas aplikasi SIMDA BMD?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai :

1. Proses penerapan aplikasi SIMDA BMD dalam pengelolaan BMD.
2. Efektivitas pengelolaan BMD dengan aplikasi SIMDA BMD.

3. Faktor yang mempengaruhi efektivitas aplikasi SIMDA BMD.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktik.

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan data empiris dalam ilmu akuntansi sektor publik terutama dalam hal pengelolaan BMD dengan menggunakan Aplikasi SIMDA BMD.

2. Aspek Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Landak untuk dijadikan masukan dan pertimbangan guna meningkatkan kinerja pengelolaan BMD.

2. LANDASAN TEORI DAN KAJIAN EMPIRIS

2.1 Pengertian Sistem, Informasi dan Manajemen

2.1.1 Pengertian Sistem

Jogiyanto (2005) sistem adalah sekumpulan dari elemen – elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, selanjutnya Hall (2007) sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama.

Selanjutnya Sutanta (2003), bentuk umum sistem dari suatu sistem terdiri atas masukan (*input*), proses dan keluaran (*output*), dalam bentuk umum sistem ini terdapat satu atau lebih masukan yang akan diproses dan akan menghasilkan suatu keluaran.

2.1.2 Pengertian Informasi

Jogiyanto (2008) informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sutarman (2012) informasi adalah sekumpulan fakta atau data yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga merekamempunyai arti bagi penerima, selanjutnya Yakub (2012) informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya.

[JAAKFE, Desember 2016]

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa “informasi merupakan data yang telah diolah, dibentuk, ataupun dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu bagi penggunaanya”.

2.1.3 Pengertian Manajemen

Manajemen mempunyai arti yang sangat luas, dapat berarti proses, seni ataupun ilmu. Dikatakan proses karena manajemen terdapat beberapa tahapan untuk mencapai tujuan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dikatakan seni karena manajemen merupakan suatu cara atau alat untuk seorang manajer dalam mencapai tujuan. Dimana penerapan dan penggunaannya tergantung pada masing masing manajer yang sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi dan pembawaan manajer. Dikatakan ilmu karena manajemen dapat dipelajari dan dikaji kebenarannya Athoillah (2010).

2.1.4 Pengertian Sistem Informasi

Stair dan Reynolds (2008) sistem informasi adalah serangkaian komponen – komponen yang mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, menyebarkan data dan informasi serta menyediakan suatu mekanisme timbal balik untuk mencapai tujuan tertentu. Satzinger (2010), sistem informasi merupakan kumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi sebagai hasil dari informasi.

2.1.5 Pengertian Sistem Informasi Manajemen

McLeod (2010) Sistem Informasi Manajemen merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama. Kumorotomo (2004) sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Lebih lanjut Kumorotomo (2004) menjelaskan bahwa unsur–unsur yang mewakili suatu sistem informasi secara umum adalah masukan (*input*), pengolahan (*processing*) dan keluaran (*output*).

2.2 Kegunaan atau Fungsi Sistem Informasi Manajemen

Berdasarkan pada pengertian-pengertian sebelumnya, maka terlihat bahwa tujuan dibentuknya Sistem Informasi Manajemen adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis.

Sehingga Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Selanjutnya informasi akan berkualitas apabila informasi tersebut bernilai dan bermanfaat, kualitas informasi tergantung dari tiga hal yang sangat dominan yaitu keakuratan informasi, ketepatan waktu, dan relevan.

2.3 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

SIMDA merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi, yang dibangun dan dikembangkan oleh BPKP dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dengan membentuk **Satuan Tugas Pengembangan SIMDA**, dengan tugas :

1. Mengembangkan/membuat dan melakukan pemutakhiran program aplikasi komputer SIMDA yang berkaitan dengan pembangunan/peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan manajemen daerah, mengarah ke *grand design Database Management System*.
2. Memberikan bimbingan teknik/pelatihan kepada satuan tugas SIMDA Perwakilan BPKP yang akan ditugaskan dalam asistensi/implementasi program aplikasi komputer SIMDA.
1. 3. Membantu satuan tugas SIMDA Perwakilan BPKP melakukan asistensi implementasi program aplikasi komputer SIMDA pada pemerintah daerah.

2.3.1 Tujuan dan Manfaat SIMDA

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA BPKP (2008) adalah :

1. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA.

[JAAKFE, Desember 2016]

2. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan *webcam* bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA.
3. Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya.
4. Sebagai media awal bagi pelaksanaan *e-government*.
5. Sebagai sarana untuk pelaksanaan *good government*.

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA BPKP (2008) adalah sebagai berikut :

1. *Database* terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama.
2. Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin).
3. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana :
 - a. *Output* dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku;
 - b. *Output* dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/kebijakan.

2.3.2 SIMDA BMD

SIMDA BMD merupakan suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan BMD dan diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD serta pengelolaan/pengendalian BMD oleh suatu unit akuntansi barang, selain menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan neraca juga menghasilkan informasi-informasi untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban pengelolaan BMD dan kebutuhan-kebutuhan manajerial lainnya.

Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan BMD meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. Aplikasi SIMDA BMD dikembangkan dalam dua basis, yaitu berbasis *desktop* dan berbasis *Web* serta dapat dikoneksikan dengan *Geographic Information System* (GIS). Keunggulan dan Manfaat Penerapan SIMDA BMD antara lain sesuai peraturan perundang-undangan, terintegrasi, *transfer of knowledge*, kesinambungan pemeliharaan dan mudah digunakan.

2.4 Barang Milik Daerah (BMD)

2.4.1 Pengertian BMD

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 butir 11 mendefinisikan BMD sebagai “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Hal yang dimaksud barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi (a) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis; (b) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak; (c) barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; dan (d) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Definisi BMD tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD.

2.4.2 Pengelolaan BMD

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMD diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan BMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 3 ayat 1, pengelolaan BMD dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas publik dan kepastian nilai.

2.4.3 Jenis BMD

Dalam Perlakuan Akuntansi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah membagi BMD menjadi beberapa unsur yaitu aset lancar, aset tetap, aset tak berwujud, aset lainnya dan aset bersejarah.

2.5 Efisiensi dan Efektifitas

2.5.1 Pengertian Efisiensi dan Efektifitas

Kata efisien berasal dari bahasa latin *efficere* yang berarti menghasilkan, mengadakan dan menjadikan. Mardiasmo (2005) pengertian efisiensi berhubungan erat dengan dengan konsep produktifitas. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil, sedangkan menurut kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Mardiasmo (2005) pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

2.5.2 Pengukuran Efisiensi dan Efektifitas

Mardiasmo (2005) efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Adapun untuk pengukuran efektivitas, keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (*output*) tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk diukur, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan tersebut, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program atau kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal

3. METODE PENELITIAN

Sugiyono (2012) “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Dalam penelitian terdapat berbagai macam metode dan teknik penelitian. Penelitian berfungsi juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada dasarnya penelitian dapat dikelompokkan menjadi penelitian kualitatif dan kuantitatif, dapat juga merupakan gabungan antar keduanya, sehingga cara-cara atau pendekatan yang akan ditempuh akan merujuk pada jenis penelitian tersebut. Terkait dengan penelitian ini merujuk kepada jenis penelitian kualitatif.

Sugiyono (2012) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi.

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Sugiyono (2012) pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

3.1.2 Sampel

Sugiyono (2012:116) pengertian sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel dalam penelitian ini adalah pimpinan atau pihak yang berwenang atau bagian yang terkait dengan penerapan aplikasi SIMDA BMD dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

[JAAKFE, Desember 2016]

(BPKAD) khususnya di Bidang Aset dan operator SIMDA BMD di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Kabupaten Landak. Adapun jumlah SKPD di Pemerintah Kabupaten Landak sebanyak 43 terdiri dari 3 (tiga) Sekretariat, 12 (dua belas) Dinas, 11 (sebelas) Badan, 4 (empat) Kantor dan 13 (tiga belas) Kecamatan, sehingga jumlah kuesioner yang disebarakan peneliti sebanyak 43 rangkap.

3.2 Teknik Sampling

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*.

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*. Sugiyono (2012) *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi *Systematic Sampling* (Sampling Sistematis), *Quota Sampling* (Sampling Kuota), *Incidental Sampling* (Sampling Insidental), *Purpose Sampling*, *Sampling Jenuh* (Sampling Sensus), *Snowball Sampling*.

Nonprobability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling*. Sugiyono (2012) *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Siregar (2013) data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Pengelompokan data menurut sumber perolehannya dibagi dalam dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Siregar (2013) teknik atau metode pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam suatu penelitian adalah wawancara, kuesioner, observasi dan studi kepustakaan.

3.3.3 Alat Analisis

- a. Untuk mengetahui proses penerapan aplikasi SIMDA BMD dalam pengelolaan BMD, maka penulis menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMN/BMD, Modul Pengoperasian dan Aplikasi SIMDA BMD Versi 2.1, data hasil wawancara serta data terkait dengan proses penerapannya.
- b. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan BMD dengan aplikasi SIMDA BMD, maka penulis menggunakan data kuesioner.
- c. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas aplikasi SIMDA BMD, maka penulis menggunakan data kuesioner dan hasil wawancara.

3.3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis adalah suatu teknik yang digunakan sebagai alat bantu bagi peneliti untuk mengambil suatu keputusan atas sejumlah data penelitian yang telah terkumpul, untuk menafsirkan dan menganalisis data digunakan teknik analisis Kualitatif. Uraian lebih lanjut tahapan pengujian atas rumusan masalah yang dilakukan oleh peneliti :

1. Untuk menjawab rumusan masalah pertama tentang bagaimana proses penerapan aplikasi SIMDA BMD dalam pengelolaan BMD di Pemerintah Kabupaten Landak, peneliti membandingkan antara proses pengelolaan BMD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD dengan Modul Pengoperasian dan Aplikasi SIMDA BMD yang digunakan serta mengolah dan menganalisis data wawancara dengan pimpinan atau pihak yang terkait atau bagian yang berwenang dan operator SIMDA BMD, sehingga dapat disimpulkan

bagaimana proses penerapan aplikasi SIMDA BMD dalam pengelolaan BMD di Pemerintah Kabupaten Landak.

2. Untuk menjawab menjawab rumusan masalah kedua tentang apakah pengelolaan BMD dengan aplikasi SIMDA BMD telah efektif, peneliti mengolah dan menganalisis data hasil kuesioner yang telah diberikan kepada masing-masing satu rangkap kuesioner untuk satu orang operator SIMDA BMD di SKPD, yang kemudian dilakukan tabulasi atas jawaban dari responden tersebut dengan skala likert masing-masing jawaban sebagai berikut :a. **Sangat Setuju** (SS) dengan nilai 4 (empat). b. **Setuju** (S) dengan nilai 3 (tiga). c. **Tidak Setuju** (TS) dengan nilai 2 (dua). d. **Sangat Tidak Setuju** (STS) dengan nilai 1 (satu).Selanjutnya data kuesioner yang telah ditabulasi dilakukan perhitungan persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan persentase menurut Supranto (2003) adalah sebagai

berikut :
$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan : N = Skor yang diperoleh

N = Skor ideal

% = Persentase

Dalam hal ini skor ideal merupakan skor maksimal atas indikator yang disajikan oleh peneliti, atau skor yang akan diperoleh apabila seluruh responden menjawab indikator yang disajikan dengan jawaban Sangat Setuju.

Berdasarkan analisis persentase tersebut, persentase tertinggi akan dijadikan kesimpulan yang kemudian dari kesimpulan tersebut peneliti sajikan secara tertulis berupa kalimat–kalimat kualitatif sehingga dapat diketahui efektivitas dari aplikasi SIMDA BMD tersebut. Adapun kriteria dalam interpretasi dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelas, yakni :

Tabel 3.1
Kriteria Interpretasi Skor

Kelas	Kriteria Interpretasi Skor	Kategori
1	81% – 100 %	Sangat
2	61% – 80 %	Efekt
3	41% – 60 %	Cukup
4	21% – 40 %	Kurang Efektif
5	0% – 20%	Sangat Kurang Efektif

Sumber : Kristanto (2013)

- Untuk menjawab rumusan masalah ketiga tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas aplikasi SIMDA BMD data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah ini adalah data hasil kuesioner penelitian yang telah melalui proses tabulasi dan analisis sehingga akan didapatkan persentase tertinggi pada sub pertanyaan tertentu untuk dijadikan kesimpulan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas aplikasi SIMDA BMD serta menggunakan data hasil wawancara.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMD, maka diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur terkait dalam pengelolaan BMD, sehingga diterbitkanlah beberapa regulasi yang mengatur pengelolaan BMD di Pemerintah Kabupaten Landak. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari segi regulasi pengelolaan BMD, Pemerintah Kabupaten Landak telah mewujudkan komitmennya untuk dapat mengelola BMD secara tertib. Selain itu, untuk menindaklanjuti komitmen yang telah dibuat tersebut berdasarkan MoU Pemerintah Kabupaten Landak dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat nomor 100/10/Pem-Um dan PRJ-72/PW14/3/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Landak. Sekretaris Daerah mengirimkan surat kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat nomor 028/105/V-

[JAAKFE, Desember 2016]

BPKAD/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Fasilitasi SIMDA BMD, yang ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat nomor ST-499/PW14/3/2014 tanggal 5 Juni 2014 perihal Pendampingan dan Narasumber Kegiatan Fasilitasi Aplikasi SIMDA BMD pada Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014.

Berdasarkan hal tersebut, mulai pada tahun 2014 seluruh pengurus barang Pemerintah Kabupaten Landak menggunakan bantuan aplikasi SIMDA BMD dalam melaksanakan tugasnya.

4.1. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BMD Kabupaten Landak

Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur tersebut antara lain adalah menyeragamkan mekanisme dan prosedur kerja dalam pengelolaan BMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan sebagai standar pelaksanaan bagi pejabat atau aparat pengelola BMD secara menyeluruh sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan BMD.

Standar Operasional Prosedur Kabupaten Landak terdiri dari 14 Pasal, 13 BAB dan 11 lampiran, yang merupakan rangkaian kegiatan dan/atau tindakan meliputi siklus pengelolaan BMD yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran; Penggunaan; Penatausahaan; Pemanfaatan; Pengamanan; Pemeliharaan; Penilaian; Penghapusan; dan Pemindahtanganan.

Berdasarkan analisis atas kesesuaian Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD. Menurut penulis, penyajian Standar Operasional Prosedur Pemerintah Kabupaten Landak telah sesuai dengan pedoman teknis pengelolaan BMD, dimana Standar Operasional Prosedur yang disusun telah mengidentifikasi dan menyajikan rangkaian kegiatan, tindakan, mekanisme dan prosedur kerja siklus pengelolaan BMD secara rinci meliputi aturan yang digunakan, pihak-pihak yang terlibat, dokumen-dokumen yang digunakan beserta formatnya dan menggambarkan bagan alur prosesnya.

Selanjutnya berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersebut, penulis mewawancarai Kepala Bidang Aset terkait

dengan penerapannya, hasil wawancara dengan Bapak Hermanto selaku Kepala Bidang Aset Pemerintah Kabupaten Landak bahwa dalam pengelolaan BMD di Pemerintah Kabupaten Landak pada Tahun Anggaran 2014 masih belum menetapkan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dengan Keputusan Bupati.

Selain itu, hasil pengadaan BMD tahun 2014 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak masih belum ditetapkan status penggunaannya dengan Keputusan Kepala Daerah. Hal ini disebabkan hasil pengadaan BMD tahun 2014 dari SKPD/Unit kerja tidak segera dilaporkan untuk diusulkan status penggunaannya kepada pembantu pengelola BMD, sebagaimana yang telah diatur dalam mekanisme dan prosedur kerja pada tahap penggunaan BMD Pemerintah Kabupaten Landak.

Namun pada Tahun Anggaran 2015 ini Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan DKBMD dan DKPBMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, serta kebijakan tentang standarisasi sarana dan prasarana sebagai pedoman yang baku untuk penataan sarana dan prasarana telah disampaikan kepada Bagian Hukum untuk diproses pembahasan dan penetapan, sedangkan untuk penetapan status penggunaan BMD atas pengadaan tahun 2014 sampai dengan saat wawancara pada tanggal 30 Agustus 2015 masih dalam proses penyusunan *draft* Surat Keputusan Bupati Landak tentang Penetapan Status Penggunaan BMD.

4.2. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Landak

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Landak terdiri dari 16 (enam belas) Pasal, 3 (tiga) Bab dan 3 (tiga) lampiran yang merupakan kerangka konseptual akuntansi pemerintah Kabupaten Landak serta 17 (tujuh belas) Kebijakan Akuntansi yaitu terdiri dari Kebijakan Pelaporan Keuangan; Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas; Piutang; Persediaan; Investasi; Aset Tetap; Dana Cadangan; Aset Lainnya; Kewajiban/Utang; Ekuitas; Pendapatan – Laporan Operasional (LO); Beban; Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Belanja; Transfer; Pembiayaan; dan Koreksi.

Namun dalam penulisan ini, penulis hanya membahas lebih lanjut Kebijakan Akuntansi yang terkait langsung dengan pengelolaan BMD yaitu Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.

4.2.1 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Hal-hal yang diatur dalam kebijakan akuntansi aset tetap antara lain definisi, klasifikasi, pengakuan, batasan nilai minimum kapitalisasi perolehan awal aset tetap, pengukuran, aset tetap digunakan bersama, aset tetap perjanjian kerjasama fasilitas sosial fasilitas umum, pertukaran aset (*exchange of assets*), aset donasi, pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*), penyusutan, penyusunan neraca awal, penghentian dan pelepasan aset tetap, penilaian kembali aset tetap (*revaluation*), penyajian, dan pengungkapan aset tetap.

4.3 Persiapan Penerapan Aplikasi SIMDA BMD

Dalam penerapan aplikasi SIMDA BMD, Pemerintah Kabupaten Landak membuat persiapan-persiapan diantaranya adalah:

1. Penetapan Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengurus, dan Penyimpan BMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2014.

Penetapan pengelola, pembantu pengelola, pengurus dan penyimpan BMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Landak Nomor 028/123/HK-2014 tanggal 7 Maret 2014.

2. Sosialisasi

Aplikasi SIMDA BMD merupakan suatu hal yang baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, dimana sebelumnya dalam pengelolaan BMD dilakukan secara manual, oleh karena itu untuk lebih memahami dan mengetahui lebih lanjut terkait hal tersebut serta peningkatan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, dalam hal ini BPKAD khusus Bidang Aset mengalokasikan beberapa kegiatan sosialisasi dalam bentuk fasilitasi, bimbingan teknis dan mengikuti lokakarya.

Selain komitmen dari segi regulasi, peningkatan kompetensi dan kualitas SDM pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, elemen lain yang juga berperandalam penerapan SIMDA BMD adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan ketersediaan sarana prasarana Pemerintah Kabupaten Landak dalam penerapan SIMDA BMD :

Tabel 4.1
Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Pemerintah Kabupaten Landak

No.	Uraian	Kuantitas	Tahun Pengadaan
A.	Perangkat Keras		
1.	<i>Personal Computer (PC)</i>	6 Unit	2014
2.	<i>Personal Computer (PC) Server</i>	1 Unit	2014
3.	Peralatan pendukung PC (<i>Keyboard, Mouse dan Speaker</i>)	21 Unit	2014
4.	<i>Uninterruptible Power Supply (UPS)</i>	8 Unit	2014
5.	HUB	1 Unit	2014
6.	Kabel <i>Local Area Network (LAN)</i>	15 Meter	2014
7.	<i>Laptop</i>	45 Unit	2015
8.	Ruangan Khusus	1 Ruang	-
B.	Perangkat Lunak (Software)		
1.	<i>Windows 7 Home Premium</i>	<i>Default PC</i>	2014
2.	<i>Windows 8 Home Premium</i>	<i>Default Laptop</i>	2015
3.	<i>Installer Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition</i>	1 Paket	-
4.	<i>Installer Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4</i>	1 Paket	-
5.	<i>Installer Aplikasi SIMDA</i>	1 Paket	-

Sumber: Olahan Observasi Peneliti

4.4 Tahapan pada Aplikasi SIMDA BMD

Berdasarkan data yang diolah penulis atas modul bimbingan teknis pengoperasian aplikasi SIMDA BMD, penulis sajikan tahapan-tahapan pada aplikasi SIMDA BMD sebagai berikut perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan.

4.5 Hasil Kuesioner

4.5.1 Penyebaran Kuesioner

Sesuai dengan penentuan sampel, maka penulis menyebarkan kuesioner kepada pengurus barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak sebanyak 43 orang. Adapun jumlah penyebaran dan pengumpulan kuesioner serta jumlah kuesioner yang diolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Distribusi Kuesioner dan Pengumpulan Data

No.	Uraian	Jumlah	Persentase
1.	Jumlah sampel	43	100
2.	Jumlah kuesioner yang disebar	43	100
3	Jumlah kuesioner yang dikembalikan (terkumpul)	43	100
4.	Jumlah kuesioner yang diolah	43	100
5.	Jumlah kuesioner yang tidak diolah	0	100

Sumber : Hasil kuesioner

Tabel 4.2 menunjukkan distribusi dan tingkat pengembalian dengan jumlah sampel sebanyak 43 orang, kuesioner yang disebar sebanyak 43 rangkap, yang kemudian dari jumlah 43 rangkap yang disebar, dikembalikan sebanyak 43 rangkap atau tingkat pengembaliannya sebesar 100% dan atas kuesioner tersebut, semuanya dapat diolah atau memenuhi syarat.

4.5.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden didasarkan pada usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan lama bekerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Usia Responden

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Menurut Kelompok Usia

No.	Usia	Orang	Persentase
1.	< 25 tahun	-	-
2.	26 – 35 tahun	18	42
3.	36 – 45 tahun	20	47
4.	> 45 tahun	5	12
	Jumlah	43	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa rata-rata responden berusia diantara 26–45 tahun dengan rincian sebanyak 18 orang berusia 26 – 35 dan sebanyak 20 orang berusia 36 - 45 tahun yang masing-masing 42% dan 47% dari jumlah keseluruhan responden. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya responden masih dalam usia produktif untuk melaksanakan tugasnya dengan sangat baik.

2. Jenis Kelamin

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Orang	Persentase
1.	Laki – laki	28	65
2.	Perempuan	15	35
	Jumlah	43	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden sebagian besar adalah laki-laki yaitu sebanyak 28 orang atau 65% dari jumlah keseluruhan responden sebanyak 43 orang, sedangkan jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 15 orang atau 35% dari jumlah keseluruhan responden. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengadminitrasikan pengelolaan BMD di Lingkungan

[JAAKFE, Desember 2016]

Pemerintah Kabupaten Landak pada umumnya dikelola oleh pegawai yang berjenis kelamin laki-laki.

3. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Orang	Persentase
1.	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	2
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	18	42
4.	Diploma I	2	5
5.	Diploma III	12	28
6.	Strata 1	10	23
7.	Strata 2	-	-
	Jumlah	43	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden sebagian besar adalah SMA yaitu sebanyak 18 orang atau 42% dari jumlah keseluruhan responden sebanyak 43 orang, sedangkan responden tingkat pendidikan Diploma III sebanyak 12 orang atau 28% dari jumlah keseluruhan responden, responden tingkat Strata 1 sebanyak 10 orang atau 23% dari jumlah keseluruhan responden, responden tingkat Diploma I sebanyak 2 orang atau 5% dari jumlah keseluruhan responden, responden tingkat SMP sebanyak 1 orang atau 2% dari jumlah keseluruhan responden dan tidak terdapat responden yang memiliki tingkat pendidikan strata 2.

4. Lama Bekerja

Tabel 4.6

Karakteristik Responden Menurut Lama Bekerja

No.	Masa Kerja	Orang	Persentase
1.	< 1 tahun	2	5
2.	2 – 5 tahun	6	14
3.	6 – 15 tahun	32	74
4.	> 16 tahun	3	7
	Jumlah	43	100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki masa kerja 6 – 15 tahun yaitu sebanyak 32 orang atau 74% dari jumlah responden secara keseluruhan, responden yang memiliki masa kerja 2 – 5 tahun sebanyak 14% atau 14% dari jumlah keseluruhan, lebih dari 16 tahun sebanyak 3 orang atau 7% dari jumlah keseluruhan dan yang masa kerja dibawah 1 tahun hanya terdapat 2 orang atau 5% dari keseluruhan jumlah responden.

4.5.3 Hasil Analisis Data

4.5.3.1 Efektifitas SIMDA BMD

Tabel 4.7

Rekapitulasi Hasil Kuesioner

No	Indikator	Sko		%	Skor Jawaban			
		Capai	Ideal		1	2	3	4
A.	Input SIMDA BMD	699	860	81	0	17	127	71
B.	Proses SIMDA BMD	567	688	82	0	3	115	54
C.	Output SIMDA BMD	1.182	1.376	86	0	3	188	153
D.	Keamanan SIMDA BMD	669	860	78	2	16	153	44
E.	Kecepatan dan Kemudahan Penggunaan SIMDA BMD	1.089	1.376	79	0	21	245	78
F.	Efektifitas SIMDA BMD	1.174	1.376	85	0	0	202	142
G.	Kualitas Informasi yang dihasilkan SIMDA BMD	854	1.032	83	0	6	166	86
H.	Dukungan							
H.1	Modul (Pedoman Pengoperasian)	426	516	83	0	6	78	45

[JAAKFE, Desember 2016]

H.2	Latihan	730	860	85	0	5	120	90
H.3	Penyelesaian Masalah Oleh Tenaga Ahli (BPKAD dan BPKP)	441	516	85	0	4	67	58
I.	Kepuasan Pengguna Dalam Menggunakan SIMDA BMD	853	1.032	83	0	7	165	86
Total		8.684	10.492	82	2	88	1.626	907

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa pengelolaan BMD dengan aplikasi SIMDA BMD sangat efektif, hal tersebut dapat dilihat dari 11 (sebelas) indikator yang penulis sajikan, terdapat 9 (sembilan) sub indikator yang termasuk dalam kategori sangat efektif yaitu *input*, proses, *output*, efektifitas, latihan, kualitas informasi yang dihasilkan, modul, penyelesaian masalah oleh tenaga ahli dan kepuasan pengguna, sedangkan 2 (dua) sub indikator lainnya termasuk dalam kategori efektif yaitu keamanan serta kecepatan dan kemudahan penggunaan SIMDA BMD.

4.5.3.2 Faktor yang mempengaruhi SIMDA BMD

Faktor yang mempengaruhi efektivitas aplikasi SIMDA BMD, yang merupakan indikator-indikator yang memperoleh interpretasi tertinggi yaitu pada indikator *output* SIMDA BMD dengan interpretasi skor sebanyak 86%, dengan sub indikator yaitu *output* dapat ditampilkan dilayar monitor, dicetak menjadi *hardcopy*, diexport menjadi *softcopy* dengan format pdf dan *microsoft excel*, memenuhi kebutuhan perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi.

Selain itu terdapat 3 (tiga) indikator yang memperoleh interpretasi skor 1% lebih rendah dari skor tertinggi yaitu indikator efektifitas, latihan dan penyelesaian masalah oleh tenaga ahli dengan rincian sub indikator sebagai berikut:

a. Efektifitas

Meningkatkan produktifitas, keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi, kompetensi, motivasi dalam bekerja, kepuasan kerja, kinerja organisasi, kelompok dan individu serta adanya pandangan yang lebih jelas tentang konteks pekerjaan dan memfokuskan pada kinerja dimasa yang akan datang.

b. Latihan

Penggunaan sistem yang ada telah dilakukan latihan oleh tenaga ahli, latihan secara praktek, sangat mendalam, sangat menyeluruh dan sampai anda benar-benar mengerti penggunaan SIMDA BMD.

c. Penyelesaian masalah oleh tenaga ahli (BPKAD dan BPKP)

Tenaga ahli sangat membantu dalam menyelesaikan masalah - masalah SIMDA BMD, masalah - masalah dalam SIMDA BMD dapat diselesaikan dengan cepat dan tingkat kepuasan dengan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam SIMDA BMD.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 30 Agustus 2015 dengan ibu Kurnia, selaku staf bidang aset menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas SIMDA BMD adalah adanya dukungan dan komitmen yang cukup tinggi dari pimpinan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan pengelolaan BMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, simpulan yang dapat diambil adalah :

1. Proses penerapan aplikasi SIMDA BMD dalam pengelolaan BMD di Pemerintah Kabupaten Landak diawali dengan adanya MoU Pemerintah Kabupaten Landak dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat tentang Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Landak. Berdasarkan MoU tersebut Pemerintah Kabupaten Landak dalam hal ini Sekretaris Daerah mengirimkan surat kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat perihal Fasilitasi SIMDA BMD, yang ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat perihal Pendampingan dan Narasumber Kegiatan Fasilitasi Aplikasi SIMDA BMD pada Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014. Adapun beberapa hal yang telah dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Landak dalam penerapan aplikasi ini, dari segi regulasi adalah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD; Peraturan Bupati Landak tentang Standar Operasional

[JAAKFE, Desember 2016]

Prosedur Pengelolaan BMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak; Peraturan Bupati Landak tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Landak dan Keputusan Bupati Landak tentang Penetapan Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengurus, dan Penyimpan BMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2014. Selain komitmen dari segi regulasi, Pemerintah Kabupaten Landak juga mengalokasikan beberapa kegiatan untuk peningkatan kompetensi dan kualitas SDM pegawainya dalam rangka penerapan aplikasi SIMDA BMD, yaitu dengan mengadakan kegiatan sosialisasi yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

2. Pengelolaan BMD dengan aplikasi SIMDA BMD sangat efektif, hal tersebut berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah atas 43 responden yang merupakan pengurus barang masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak yang telah menggunakan aplikasi SIMDA BMD dengan total skor yang dicapai adalah 8.684 sedangkan skor idealnya adalah 10.492 sehingga interpretasi skor yang diperoleh adalah 82% atau termasuk dalam kategori sangat efektif.
3. Faktor yang mempengaruhi efektivitas aplikasi SIMDA BMD, yang merupakan indikator-indikator yang memperoleh interpretasi tertinggi yaitu pada indikator *output* SIMDA BMD dengan interpretasi skor sebanyak 86%, dengan sub indikator yaitu *output* dapat ditampilkan dilayar monitor, dicetak menjadi *hardcopy*, diexport menjadi *softcopy* dengan format pdf dan *microsoft excel*, memenuhi kebutuhan perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi.

5.2 Rekomendasi

1. Agar Pemerintah Kabupaten Landak secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi dan kualitas SDM pegawainya, khususnya di Bidang Aset sehingga apabila terjadi permasalahan terkait dengan pengelolaan BMD menggunakan aplikasi SIMDA BMD dapat dengan segera ditangani dan diberikan solusinya, selain itu dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada para pengurus barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

Saa'dillah

2. Regulasi yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Landak terkait pengelolaan BMD agar diterapkan dengan baik, khususnya pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran.
3. Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada tahun 2015, penyajian kembali (*Restatement*) laporan keuangan neraca wajib dilakukan, sehingga Pemerintah Kabupaten Landak perlu mengidentifikasi akun-akun pada neraca salah satunya adalah Aset Tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Athoillah, Anton (2010) *Dasar - dasar Manajemen*. Bandung: C.V Pustaka Setia.
- Danim, Sudarwan. (2004) *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Bengkulu: PT. Rineka Cipta.
- Jogiyanto HM (2008) *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- James, A. Hall (2007) *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Ketiga, Terjemahan Amir Abadi Yusuf. Jakarta: Salemba Empat.
- Kumorotomo (2004) *Sistem Informasi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Mardiasmo (2002) *Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Pembiayaan Desentralisasi*. Yogyakarta: FE-UGM.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mcleod, Raymond (2010) *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Satgas Pengembangan SIMDA (2008) *SIMDA dan Penerapannya*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S. D (2010) *System Analysis And Design in A Changing World*. Boston, MA: Course Technology.
- Stair, Ralph, and Reynolds, George (2008) *Principles of Information Systems*, 8th Edition, Thomson Learning.
- Sugiyono (2012) *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan Ke-20. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, Syofian (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada.

Saa'dillah

Supranto, J (2003) *Metode Penelitian Hukum Statistik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sutanta Edhy (2003) *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sutarman, M.Kom (2012) *Pengantar Teknologi Informasi*, Edisi Pertama. Jakarta:
Bumi
Aksara.

Yakub (2012) *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dokumen :

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai pengganti peraturan
pemerintah sebelumnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan BMD.

[JAAKFE, Desember 2016]

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Landak.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Instruksi Presiden Nomor Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pernyataan Standar Pemeriksaan 03.01 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Komite Standar Pemeriksaan Keuangan Negara tahun 2008.

Lain – lain :

Kristanto, Johan (2013) *Efektivitas Program Dana Bergulir Bagi UKM dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Pada UKM Binaan Dinas Koperasi, Kota Surabaya)* Jurnal

Penelitian Universitas Negeri Surabaya

<https://www.scribd.com/doc/143913362/EFEKTIVITAS-PROGRAM-DANA-BERGULIR-BAGI-UKM-DALAM-PEMBERDAYAAN-EKONOMI-Studi-Pada-UKM-Binaan-Dinas-Koperasi-Kota-Surabaya#download> retrieved on 28 Maret 2015.

<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Pengenalan-Sistem-Informasi-Manajemen-DaerahSIMDA-.bpkp> retrieved on 28 Maret 2015.

http://www.slideshare.net/yudi_prihanto_santoso/pengertian-penatausahaan-barang-milik-daerah retrieved on 28 Maret 2015.

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/461/jbptunikompp-gdl-resminings-23003-10-unikomh-i.pdf> retrieved on 28 Maret 2015.